



ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT TEORI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK WILLIAM N. DUNN

Bian Ramadhani ¹, Rajwa Maitsa ², Riswanda ³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Email:

bianramadhani3@gmail.com.

rajwamaitsa@gmail.com.

riswanda@untirta.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi *triple burden of nutrition* utamanya stunting dan gizi buruk. Sejumlah permasalahan yang muncul antara lain adalah sentimen masyarakat yang negatif atas program sebab distribusi yang terhambat, kualitas makanan yang dinilai tidak mencukupi nilai gizi, dan pemborosan anggaran sehingga kebijakan dirasa tidak efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan MBG dengan perspektif efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn yakni efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dari segi efisiensi diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih mengalami tantangan dari

segi kecukupan utamanya kualitas makanan dan nutrisi yang terkandung dalam menu makanan. Penerimaan MBG yang masih berpusat di Jawa menandakan variabel pemerataan masih menjadi tantangan. Kebijakan dinilai tepat, karena mampu inklusif dan mengatasi kesenjangan yang ada. Kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan ini layak dilanjutkan, namun perlu melakukan perbaikan di berbagai sisi yang masih menjadi permasalahan sehingga kebijakan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: efektivitas, kebijakan publik, MBG

ABSTRACT

Makan Bergizi Gratis (MBG) is a primary program of President Prabowo Subianto's Asta Cita aimed at addressing the triple burden of nutrition, particularly stunting and malnutrition. Several problems have emerged, including negative public sentiment toward the program due to constrained distribution, food quality that is considered insufficient in meeting nutritional values, and budgetary waste that causes the policy to be perceived as ineffective. This article aims to analyze the effectiveness of the MBG policy using William N. Dunn's policy effectiveness perspective, namely efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The method employed in this study is qualitative. The findings indicate that, in terms of efficiency, the policy is projected to be able to encourage economic growth; however, it still faces challenges in terms of adequacy, particularly regarding food quality and the nutritional content of the meals provided. The implementation of MBG, which remains concentrated in Java, indicates that the equity variable continues to be a challenge. The policy is considered appropriate, as it is able to be inclusive and address existing gaps. The conclusion shows that this policy is feasible to be continued; however, improvements are required in various aspects that remain problematic so that the policy can become truly effective and well targeted.

Keywords: effectiveness, public policy, MBG



PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak, yang berkaitan dengan masalah publik. Kemudian, hal tersebut dirumuskan dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun program guna mencapai tujuan bersama, memecahkan berbagai permasalahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Igirisa, 2022). Kebijakan publik hadir untuk mengatasi masalah dan menjembatani antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat. Kebijakan publik juga hadir dalam isu-isu sensitif seperti permasalahan perdagangan manusia, narkoba, dan tembakau yang perlu diregulasikan secara cermat karena berpotensi mencederai kesejahteraan rakyat, utamanya anak-anak (Riswanda, 2023).

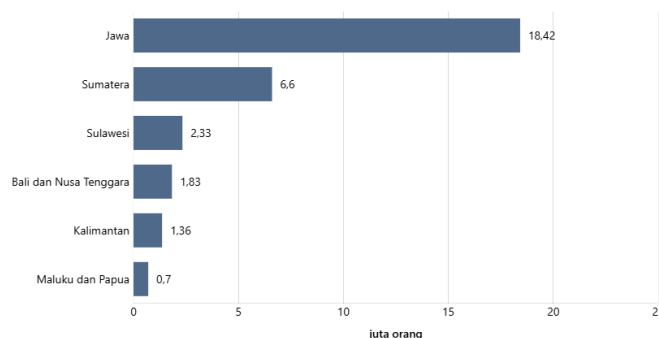
Kebijakan publik juga diperlukan untuk mengatasi isu yang telah lama menjadi permasalahan, utamanya yang berkaitan dengan kelompok rentan. Salah satu permasalahan tersebut yang berusaha dituntaskan oleh Indonesia adalah terkait *triple burden of nutrition*. Tiga permasalahan tersebut yakni gizi kurang (*stunting*, *wasting*, *underweight*), gizi lebih (obesitas), defisiensi gizi mikro (kekurangan zat besi, yodium, vitamin A, dan lainnya (Septati, 2025). Mengacu pada data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional ialah 19,8%, menurun cukup signifikan dari 21,5% dibandingkan tahun 2023. Angka tersebut masih berada di batas aman yang ditetapkan WHO (< 20%) dan masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2029.

Salah satu kebijakan yang diusung untuk mengatasi hal tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini adalah program unggulan Presiden Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Pada tanggal 6 Januari 2025, program MBG telah resmi dilaksanakan dengan target penerima manfaat di tahun 2025 sebanyak 82,9 juta orang dengan dilayani oleh 32.000 SPPG (Idris et al., 2025). Program MBG ditargetkan untuk kelompok penerima manfaat yaitu balita, peserta didik jenjang Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga SMA baik swasta maupun negeri. Selain itu, program ini juga menargetkan ibu hamil dan menyusui.

Dasar regulasi dalam implementasi adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terkait Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga per Agustus 2025, program ini telah menelan biaya APBN sebesar 1,2 Triliun. Dalam implementasinya, MBG menghadapi sejumlah tantangan. Menurut penelitian Idris et al., (2025) masyarakat mulanya sangat optimis terhadap MBG, kemudian mengalami pergeseran pandangan menjadi negatif dan menganggap program tidak efektif dan terkesan membuang anggaran sebab berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Berbagai isu dan permasalahan di lapangan antara lain adalah kasus keracunan makanan MBG yang berimbas pada pelarangan orang tua terhadap anaknya untuk mengkonsumsi makan siang gratis di sekolah (BBC, 2025b). Sejumlah sekolah mengeluhkan terlambatnya distribusi MBG maupun kualitas MBG yang dinilai kurang memenuhi standar. Bahkan, sejumlah survey melaporkan bahwa terdapat menu MBG yang diterima basi sebanyak 35,9% dari keseluruhan informan (Ridwan, 2025b).

Selain itu, penerimaan MBG masih belum merata. Meskipun ditujukan untuk mengatasi permasalahan gizi dan nutrisi, ternyata penerimaan MBG masih berpusat di Jawa. Berdasarkan Katadata (2025), penerima manfaat MBG sebanyak 31,2 juta orang. Namun, penerima manfaat mayoritas masih di Pulau Jawa dengan persentase 59% dari total penerima MBG. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:



Gambar 1. Penerima MBG Berdasarkan Pulau Per Oktober 2025
Sumber: Katadata (2025)

Berbagai permasalahan dalam satu tahun implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan pertanyaan publik, yakni apakah program tersebut efektif atau tidak. Menurut *Rapid Assasement* yang dilakukan oleh Ombudsman RI (2025) dalam Siaran Pers Nomor 52/HM.01/IX/2025. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program MBG ini, yakni 1) penundaan berlarut; 2) diskriminasi; 3) tidak kompeten; dan 4) penyimpangan prosedur. Temuan tersebut memperkuat dugaan masyarakat bahwa program MBG tidak efektif.

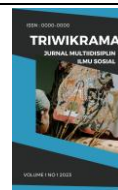
Guna menyimpulkan suatu kebijakan efektif atau tidak, perlu suatu analisis secara mendalam dan tidak klain secara sepihak. Efektif artinya mampu mencapai tujuan yang dikehendaki, utamanya dalam mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan publik yang tidak efektif akan berdampak pada gagalnya pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Sutmasa, 2021). Menurut William N. Dunn (dalam Putri & Purnamasari, 2025) menyebutkan bahwa sejumlah variabel guna memastikan suatu kebijakan publik itu efektif antara lain adalah melalui variabel efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sejumlah studi menganalisis MBG dari berbagai sisi, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Idris et al., 2025) yang berfokus pada pendapat publik dalam melihat kebijakan MBG. Dalam studi tersebut, diungkapkan bagaimana respon publik melalui sosial media yang mulanya optimis namun kemudian mulai pesimis sebab implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam studi (Kiftiyah et al., 2025) berfokus dari sisi substansi kebijakan namun belum menilai efektivitas kebijakan ini secara menyeluruh. Padahal, efektivitas suatu kebijakan sangat penting, guna mendukung keberlanjutan program atau advokasi kebijakan guna menghentikan suatu program. Guna menganalisis hal tersebut, harus memperhatikan berbagai sudut pandang sehingga penilaian tidak berat sebelah (Riswanda, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini berusaha mengkaji efektivitas program MBG dengan teori efektifitas kebijakan oleh Dunn. Artikel ini berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut Teori Efektivitas Kebijakan Publik William N. Dunn”. Dengan adanya kajian kebijakan publik ini, maka dapat disimpulkan secara teoritis apakah kebijakan layak dilanjutkan atautakah tidak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif *critical systemic thinking*. Data yang didapatkan melalui studi literatur yang telah dikumpulkan dan dianalisis, diolah secara deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih sebab mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik yang ada di era kontemporer ini, dimana masyarakat cenderung mengalami degradasi kepercayaan terhadap institusi publik.



Critical systemic thinking memberi apresiasi pada dalamnya argumen yang dianalisis dari ketidaksempurnaan rasionalitas yang keluar dari tipikal realitas keseharian masyarakat yang bersesuaian dengan konteks keberadaannya. Keseimbangan perspektif *etic* dan *emic* peneliti menentukan seberapa jauh *critical systemic thinking* memperkaya metode penelitian kebijakan (Riswanda, 2024).

Dapat diketahui bahwa *critical systemic thinking* pada dasarnya ialah satu dari berbagai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik dengan mendorong kreativitas peneliti kebijakan dalam memadukan teknik riset dengan kombinasi multi-perspektif yang relevan dengan kajian penelitian. Hal ini kemudian mampu menjembatani peneliti dengan pembuat kebijakan dan menghilangkan sekat (*boundary judgement*) antar argumen para kaum marjinal dengan kaum yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Data didapatkan dengan studi literatur. Berbagai studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah jurnal, artikel berita, berkas kebijakan, buku-buku, dan berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut William N. Dunn, variabel untuk meninjau apakah suatu kebijakan efektif atau tidak adalah melalui variabel efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam kaitannya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), penjelasan atas variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Efisiensi (*efficiency*)

Hal ini berkaitan dengan rasionalitas ekonomi, dimana hal ini berkaitan dengan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang mana umumnya dihitung dengan biaya moneter. Efisiensi umumnya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit atau per produk atau layanan. Menurut Dunn, biaya yang kecil dengan manfaat maksimal disebut sebagai efisien.

Anggaran yang disediakan untuk MBG yakni sebanyak 71 triliun rupiah, dimana angka tersebut berpotensi pemborosan untuk anggaran negara serta dapat memangkas anggaran pada sektor lain. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) UGM (2025) bahwa program MBG dinilai menghadapi tantangan yang besar dan pemborosan karena sifatnya yang universal.

Meskipun demikian penelitian yang dilakukan oleh bahwa terdapat efek pengganda adanya MBG ini. Pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk program MBG tidak hanya berakhir konsumtif, melainkan disebutkan sebagai wujud investasi ekonomi dan mampu mendorong PDB. Hal ini dapat dilihat dari proyeksi tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah sasaran (juta orang)	Estimasi Biaya MBG (Triliun)	Estimasi Daya Dorong Terhadap PDB (Triliun)
2025	19,47	71	4.510,0
2026	30,46	109,7	6.967,2
2027	41,45	149,2	9.479,4
2028	62,18	223,8	14.219,1
2029	82,9	298,4	18.958,8

Gambar 2. Estimasi Manfaat Ekonomi Program MBG

Sumber: INDEF (2024)

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier, program MBG diasumsikan bahwa tiap 1 Triliun belanja pendidikan akan meningkatkan nilai PDB sebesar 63, 52 Triliun. Selain itu, menurut proyeksi tersebut, tiap seribu rupiah yang dikeluarkan akan mampu memberi manfaat ekonomi



hingga 63.500 rupiah. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, program MBG telah mencukupi variabel efisien. Meskipun demikian, tabel proyeksi tersebut memiliki makna bahwa angka proyeksi adalah suatu estimasi dan harapan. Dengan kata lain, kebijakan perlu dilaksanakan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan dengan baik sehingga mampu mencapai potensi terbaiknya.

Kecukupan (*adequacy*)

Hal ini merupakan kebijakan publik yang berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas mampu memuaskan kebutuhan, nilai, serta kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Apabila ditinjau dari tujuan dari program MBG, tujuan utama yang hendak diatasi adalah terkait *triple burden of nutrition* utamanya kekurangan gizi anak, stunting, dan akses makanan bergizi yang timpang.

Sementara itu, implementasi MBG di lapangan menunjukkan bahwa nutrisi yang terkandung dalam menu MBG kerap kali tidak mencukupi standar. BBC Indonesia (2025) melaporkan, bahwa pemeriksaan gizi yang dilakukan menemukan bahwa setelah mengamati enam jenis sajian menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), hanya satu yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2019 RI. Sebagai contoh, pada takaran isi piring anak Sekolah Dasar, kalori yang harus terpenuhi sekurang-kurangnya adalah antara 500-700 dan didalamnya terkandung unsur karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, dan vitamin. Namun, realitas di lapangan kecukupan nutrisi tersebut jarang sekali terpenuhi.

Perataan (*equity*)

Perataan dalam kebijakan publik memiliki makna bahwasannya terdapat keadilan dalam sasaran kebijakan publik. Dunn dalam hal ini menyebutkan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial yang merujuk pada kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu rata dan adil dalam pendistribusiannya.

Program MBG dari segi pemerataan masih sangat jauh dari kata adil, sebab mayoritas penerimanya masih berada di Pulau Jawa. Sementara itu, target yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Di Papua, proses distribusi terhambat sebab medan dan lokasi yang sulit dilalui (Tempo, 2025). Permasalahan tersebut sejatinya adalah ketimpangan infrastruktur yang telah lama menjadi permasalahan di sejumlah daerah di Papua, dengan demikian, program MBG turut terhambat dalam rangka distribusi yang kemudian menyebabkan pemerataan sulit untuk tercapai.

Tidak hanya dari segi medan yang sulit dilalui, Fasilitas yang kurang memadai dan juga tenaga kerja yang belum mumpuni turut berkontribusi terhadap terhambatnya MBG. Hingga awal Agustus 2025, tiga kabupaten di Papua Barat Daya belum memiliki dapur MBG (Trisnah, 2025). Berbagai fasilitas dasar seperti air dan listrik belum tersedia di sejumlah dapur MBG di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG masih jauh dari kondisi yang inklusif atau merata.

Responsivitas (*responsiveness*)

Variabel responsivitas dalam kebijakan publik dapat dimaknai sebagai respon dari suatu aktivitas yang maknanya adalah tanggapan tepat sasaran. Hal ini menurut Dunn adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, maupun nilai kelompok dari masyarakat tertentu. Dengan kata lain, suatu kebijakan akan dianggap berhasil apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat.



Studi Kiftiyah et al., (2025) menunjukkan bahwa MBG mampu menjadi jawaban atas adanya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. MBG diberikan kepada seluruh siswa secara merata, sehingga mampu memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu. MBG juga dipandang sebagai langkah menuju sistem pendidikan yang modern serta difusi inovasi.

Praktik memberikan makanan bergizi gratis di sekolah tidak pertamakali dilakukan oleh Indonesia. Di Jepang, program pemberian makan siang bergizi telah lama dilakukan, yakni "*Kyushoku*" yang telah hadir sejak tahun 1947 dengan menu makanan seimbang dan edukasi gizi (Waida & Kawamura, 2022).

Selain itu, Amerika Serikat memiliki program bernama *National School Lunch Program* (NSLP) yang ditujukan untuk jutaan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Finlandia yang dikatakan memiliki program makanan sekolah terbaik di dunia yang mencakup pemberian makanan dengan standar gizi ketat dan menu makanan sehat (Park, 2024). Dalam studi INDEF juga diungkapkan, bahwa negara-negara dengan pendapatan serupa Indonesia yakni menengah juga turut melaksanakan program serupa untuk mengatasi permasalahan gizi, meskipun menghadapi sejumlah tantangan dari segi pemerataan (INDEF, 2024).

Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan menurut Dunn adalah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi alternatif guna dijadikan suatu rekomendasi apakah hasil dari alternatif itu dapat menjadi pilihan tujuan yang layak. Hal ini dapat dimaknai bahwa kebijakan dikatakan tepat apabila hal tersebut adalah kebijakan terbaik baik secara nilai dan kondisi dibandingkan kebijakan-kebijakan alternatif lainnya.

Sebelum diimplementasikan kebijakan MBG, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi *triple burden of nutritions*. Di era pemerintahan Joko Widodo, masalah stunting direspon dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan tentang Strategi Nasional yang terdiri dari pilar-pilar strategi. Meskipun terdapat penurunan angka stunting, namun hasilnya masih sangat jauh dari target nasional. Sementara itu, MBG mampu memberikan kerangka kerja kebijakan yang secara jelas dan terukur untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada. Dengan demikian, kebijakan MBG adalah suatu kebijakan baru dibandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya dan dikatakan lebih baik secara nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dapat dimaknai bahwa kebijakan ini layak dilanjutkan, karena dapat berada di kondisi ideal dan efektif dengan catatan mampu mengatasi kesenjangan di sejumlah variabel yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Artikel ini memiliki kekurangan, sebab dalam menilai efektivitas kebijakan MBG dilakukan di tahun pertama. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Bagi pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan kualitas makanan, distribusi, dan kesenjangan penerimaan dalam implementasi kebijakan. Diharapkan kebijakan ini mampu menghasilkan output yang diharapkan di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe. (2025). *Program MBG Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu*. UGM (<https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Program-Mbg-Dinilai-Berisiko-Pemborosan-Sebaiknya-Diprioritaskan-Pada-Anak-Keluarga-Kurang-Mampu/>).
- BBC. (2025a). *Program makan bergizi gratis andalan Presiden Prabowo Subianto “belum memenuhi standar kebutuhan gizi.”* BBC Indonesia (<https://www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cd0e05p7n1go>).
- BBC. (2025b). *Ribuan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis, orang tua trauma dan larang anaknya konsumsi MBG - “Bukannya meringankan malah mau membunuh.”* BBC (<https://www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cm2zney05ypo>).
- Idris, I., Wangge, G., W, I., Riekasapti, T. A., Annisa, & Amalia, N. (2025). From Hope to Despair: Evaluation of MBG's Narrative and Public Communication on X, Instagram, & TikTok (Jan-Sep 2025). *Monash Data & Democracy Reserch Hub*.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta. www.tabgrafika.com
- INDEF. (2024). *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial - Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Ombudsman RI. (2025). *Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis*. Ombudsman RI (<https://Ombudsman.Go.Id/News/r/Ombudsman-Ri-Temukan-Empat-Potensi-Maladministrasi-Dalam-Program-Makan-Bergizi-Gratis>).
- Park, J. (2024). Food is Medicine: A Review of Current Government School Lunch Food is Medicine: A Review of Current Government School Lunch Policies Across America Policies Across America. *Undergraduate Research Journal for the Human Sciences*, 17. <https://newprairiepress.org/urjhs>
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114-126. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Ridwan, A. (2025a). *Jumlah Penerima MBG per 3 Oktober 2025, Pulau Jawa Terbanyak*. Katadata (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/68f19735c4ff6/Jumlah-Penerima-Mbg-per-3-Oktober-2025-Pulau-Jawa-Terbanyak>).
- Ridwan, A. (2025b). *Survei: 35,9% Remaja RI Penerima MBG Pernah Dapat Makanan Basi*. Katadata (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/691d381ae145e/Survei-359-Remaja-Ri-Penerima-Mbg-Pernah-Dapat-Makanan-Basi>).
- Riswanda. (2022). *Bernalar Kritis dalam Sebuah Dialektika Kebijakan*. CV. Sintesia.
- Riswanda. (2023). *Menerapkan Literasi Kebijakan Publik: Seri Tembakau, Narkoba, Pornografi, dan Perdagangan Orang*. Mazda Media.
- Riswanda. (2024). *Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik*. CV. Sintesia.
- Septati, D. I. (2025). *Program MBG: Buka Akses Gizi Sehat Untuk Masyarakat Indonesia*. Kementerian Keuangan (<https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Program-Mbg-Buka-Akses-Gizi-Sehat-Untuk-Masyarakat-Indonesia>).
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawati*, 04(1).



- Tempo.co. (2025). Bupati di Papua Pegunungan: Makan Bergizi Gratis Sulit Dilaksanakan, Tak Ada Anggaran Hingga Kendala Akses. *Tempo* (<https://www.Tempo.Co/Politik/Bupati-Di-Papua-Pegunungan-Makan-Bergizi-Gratis-Sulit-Dilaksanakan-Tak-Ada-Anggaran-Hingga-Kendala-Akses--1209864>).
- Trisnah. (2025). Tiga Kabupaten Belum Memiliki Dapur Makan Bergizi Gratis. *Sorongraya.Com* (<https://Sorongraya.Co/Metro/Tiga-Kabupaten-Belum-Miliki-Dapur-Makan-Bergizi-Gratis/>).
- Waida, Y., & Kawamura, M. (2022). Japanese School Lunch and Food Education. In *School Food, Equity and Social Justice: Critical Reflections and Perspectives* (pp. 171-186). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003112587-15>